

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di bidang pemerintahan khususnya bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para calon Apoteker menjadi mengerti mengenai tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Seksi Faralkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, mahasiswa juga mengenal program-program Seksi Faralkes (Farkomnik, Oblik dan POR, NAPZA, Alkes dan PKRT, OT-Kos, MakMin, Ketenagaan dan YanMas, dan SIKER).
2. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kabupaten Malang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pendistribusian sediaan farmasi di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Kunjungan ke Puskesmas Pakisaji, di Kabupaten/Kota Malang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pelaporan penggunaan sediaan farmasi, program Puskesmas untuk kesehatan masyarakat sekitar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian tingkat dasar.

5.2. Saran

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi JawaTimur, saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Bila memungkinkan adanya tambahan waktu untuk melakukan kunjungan singkat yaitu mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alkes sehari-hari, dalam mengelola perbekalan farmasi serta bagaimana peran apoteker dalam memastikan bahwa perbekalan obat dan alkes sudah sesuai kebutuhan. Selain itu diharapkan dengan adanya kunjungan singkat tersebut, mahasiswa profesi dapat melihat kenyataan dilapangan, sehingga dapat membayangkan gambaran kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alkes terlepas dari teori yang diperoleh.

2. Bagi Kunjungan Puskesmas

Apabila memungkinkan adanya kunjungan juga di puskesmas dan gudang farmasi di daerah Surabaya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melihat atau membandingkan antara puskesmas yang berada di daerah (misalnya puskesmas di Malang dan di Surabaya).

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan lebih berkonsentrasi dan lebih aktif dalam menggali informasi selama proses PKPA di seksi Faralkes berlangsung sehingga bisa memperoleh banyak pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Pedoman Penatalaksanaan Keracunan di Rumah Sakit, 2005, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, Pedoman Pertolongan Keracunan Untuk Puskesmas, Bahan Kimia, 2005, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 03.1.34.11.12.7542 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MenKes/SK/X/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2004 tentang Standart Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun

2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No. HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Pendistribusian Obat yang Baik, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 Tahun 1993 tentang , Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189 tahun 2006 mengenai Kebijakan Obat Nasional (KONAS), Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Departemen Kesehatan, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190 Tahun 2010 Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedagang Besar Farmasi, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75/MENKES/SK/III/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 53 Tentang Label dan Iklan Pangan, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan , Jakarta.

Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Departemen Kesehatan, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Departemen Kesehatan, Jakarta.